

ABSTRAK

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, perlu terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya. Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga tidak luput dari kasus-kasus korupsi yang merupakan wilayah hukum Polda Aceh

Penulis merasa tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji dan membahas secara menyeluruh masalah Tindak Pidana Korupsi, dengan permasalahan, Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, Bagaimana Kebijakan Polri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, Apa hambatan Polri dalam penanggulangan korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh?

Oleh karena fokus dan tujuan dari penelitian ini lebih berorientasi kepada upaya untuk memahami dan menjelaskan efektivitas Kebijakan Polri dalam penanggulangan tindak pidana Korupsi (Studi kasus wilayah hukum Polda Aceh), maka “penelitian kualitatif” yang akan menjadi landasan studi ini, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Aceh melalui politik kriminal (*criminal policy*) baik melalui upaya penal yang bersifat menanggulangi setelah terjadinya kejahatan (represif), upaya non penal yang bersifat mencegah terjadinya kejahatan (preventif), ataupun gabungan keduanya. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Polda Aceh,

ABSTRACT

To create a just, prosperous and prosperous Indonesian society, it is necessary to continuously improve efforts to prevent and eradicate criminal acts in general and criminal acts of corruption in particular. Nanggroe Aceh Darussalam Province is also not spared from corruption cases which are under the jurisdiction of the Aceh Police

The author feels interested in conducting research to examine and thoroughly discuss the problem of Corruption Crimes, with the problem, How is the regulation of criminal acts of corruption according to Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001, What is the National Police's policy in overcoming criminal acts of corruption in the jurisdiction of the Aceh Regional Police? What are the obstacles to the Police in overcoming corruption in the jurisdiction of the Aceh Regional Police?

Because the focus and objectives of this research are more oriented towards efforts to understand and explain the effectiveness of National Police Policy in dealing with Corruption crimes (Case study of the Aceh Regional Police jurisdiction), "qualitative research" will be the basis for this study, using a normative juridical approach and sociological juridical

Efforts to overcome criminal acts of corruption in the jurisdiction of the Aceh Regional Police through criminal politics (criminal policy) either through penal efforts which are to deal with the aftermath of a crime (repressive), non-penal efforts which are to prevent the occurrence of crime (preventive), or a combination of both. Criminal politics is essentially an integral part of efforts to protect society (Social Defense) and efforts to achieve social welfare (Social Welfare) and therefore it can be said that the ultimate goal or main objective of criminal politics is the protection of society to achieve social welfare.

Keywords: Corruption Crime, Aceh Regional Police,